

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Jammu dan Kashmir berawal dari pembagian anak benua pada tahun 1947. Konflik India-Pakistan pertama atas Kashmir yaitu setelah kemerdekaan mengakibatkan pembagian wilayah menjadi "Jammu dan Kashmir" yang dikuasai India.¹ India dan Pakistan telah saling memperebutkan Kashmir dengan intens, terjadinya konflik secara tanpa henti berdampak kepada masyarakat Kashmir terkhusus minoritas Hindu yaitu Etnis Pandit Kashmir.

Pandit Kashmir kerap menjadi target pembunuhan para mayoritas di Kashmir yang membuat etnis ini benar-benar hidup ditepi jurang kematian, mengakibatkan etnis ini berkurang jumlah populasinya. Populasi Pandit Kashmir yang menyusut minoritas terbesar Kashmir bahkan lebih mencolok. Menurut angka sensus pada tahun 1981, populasi Pandit Kashmir di lembah adalah 15 persen, yang turun menjadi 5 persen pada tahun 1991 menjadi 0,01 persen lebih jauh di tahun-tahun berikutnya.² Jumlah Pandit Kashmir yang tinggal di Lembah Kashmir telah menurun dari lebih dari 140.000 pada

¹ Dr Abdul Majid dan Dr Mahboob Hussin, "Kashmir: A conflict between India and Pakistan." *South Asian Studies* Vol 31, No. 1 (2020),150.

² Dr MK Teng and CL Guddu for Joint Human Rights Committee, White Paper on Kashmir, *Gupta Print Services* (2023): 67.

tahun 1989 menjadi kurang dari 4.000 pada tahun 2021, kejadian ini merupakan penurunan lebih dari 97% selama tiga dekade.³

Angka penyusutan ini masih terjadi hingga sekarang dikarenakan masih adanya konflik yang terjadi di daerah tersebut. Baru ini saja terjadi seorang teroris yang menembak mati seorang Pandit Kashmir yang berusia 43 tahun, dimana ini sudah terjadi tujuh kali sejak tahun 2020.⁴ Sementara itu ada juga pembunuhan yang dilakukan oleh militan di mana enam Etnis Pandit Kashmir meninggal.⁵

India memiliki peran penting untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada Pandit Kashmir ini, yang utama tentunya karena konflik yang terus berlanjut tanpa henti dan banyak HAM yang sudah dilanggar. India adalah penandatangan beberapa konvensi hak asasi manusia internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi bagi semua individu. India mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak semua warganya, termasuk komunitas Pandit Kashmir.⁶

Jaringan hubungan yang kompleks antara India dan Pakistan telah terjerat lebih jauh oleh konflik Pandit Kashmir yang sedang berlangsung, yang berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan antara kedua negara tetangga bersenjata nuklir ini.

³ "Jammu & Kashmir: 97% Drop in Kashmiri Pandits Population in Valley Since 1989," The Wire, diakses pada 20 November 2022 thewire.in/rights/jammu-kashmir-97-drop-in-kashmiri-pandits-population-in-valley-since-1989

⁴ "Kashmiri Pandit killed in Jammu & Kashmir, 7th since 2020," The Times Of India, diakses pada 20 November, 2022, <https://timesofindia.indiatimes.com/india/kashmiri-pandit-killed-in-jammu-kashmir-7th-since2020>

⁵ "Kashmiri Pandit shot dead by militants in J&K's Shopian" The Hindi, diakses pada 20 November 2022, <https://www.thehindu.com/news/national/kashmiri-pandit-shot-dead-by-militants-in-jks-shopian>

⁶ "India and International Human Rights Obligations" *International Commission of Jurists*, 2018.

Dengan sejarah konflik yang penuh gejolak di wilayah Kashmir, penderitaan para Pandit Kashmir telah menjadi titik fokus dalam upaya diplomatik Pakistan terhadap India. Dampak dari ketidakstabilan dan kekerasan di Lembah Kashmir meluas di luar zona konflik langsung, membayangi negara-negara tetangga, terutama Cina dan Afghanistan. Cina mendapati dirinya terlibat dalam perselisihan teritorial dengan India di wilayah Aksai Chin, sementara Afghanistan bergulat dengan tantangan internal yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok pemberontak. Kerusuhan di Kashmir memiliki potensi untuk bergema di seluruh wilayah ini, mempengaruhi dinamika keamanan yang rumit yang sedang terjadi.⁷

Partai Bharatiya Janata yaitu partai nasionalis India kini mengikuti kebijakan '*Hindu First*'. Kebijakan '*Hindu First*' merupakan perluasan dari kebijakan yang pertama kali diusulkan mendiang Kalyan Singh, kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan umat Hindu.⁸ Dengan demikian bisa dilihat bahwa Etnis Pandit Kashmir sendiri adalah minoritas Hindu, oleh karena itu India harus melakukan sesuatu dengan konflik tersebut.

Ada hal yang lain yang perlu dipertimbangkan jika ingin menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir yang berada di Kashmir yaitu keterkaitannya dengan Pakistan. Diketahui bahwa Pakistan berusaha untuk menjaga konflik Kashmir tetap hidup dalam

⁷ Souma Tawkeel, "Kashmir in India-Pakistan Relations: Perspectives Pakistan's Nuclear Policy, Background and Development Towards conflict resolution," *International Journal of Science and Society* Vol 5, no. 1 (2023): 64-73.

⁸ "Battle for UP: BJP follows 'Hindu first' policy to counter Akhilesh", Deccan Herald, diakses, diakses pada 20 November 2022, www.deccanherald.com/national/national-politics/battle-for-up-bjp-follows-hindu-first-policy-to-counter-akhilesh

konflik melawan India agar membuat lemah India sedangkan sekarang dengan memasukkan agen mata-mata yang berasal dari Pakistan yaitu ISI (Inter-Services Intelligence), dimana agen ini memasok drone canggih ke kelompok-kelompok teror Kashmir.⁹ Dalam konteks ini, konflik ini harus diselesaikan India karena berhubungan dengan perang kemerdekaan antara India-Pakistan, di mana takutnya akan ada banyak organisasi teroris yang bersekutu dengan Pakistan.

Sebelum Agustus 2019, Kashmir memiliki konstitusinya sendiri yang melindungi hak warga negara atas properti, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Oleh karena itu kemenangan partai BJP (Bharatiya Janata Party) di India pada tahun 2019, Pemerintah Federal India mencabut Pasal 370 Konstitusi India, yang memberikan hak khusus kepada negara bagian itu, termasuk konstitusi dan benderanya sendiri. Setelah Agustus 2019, India memberikan lebih dari 200.000 hak domisili penduduk non-negara bagian.¹⁰ Hal ini menjadi bukti di mana adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah India untuk masalah Pandit Kashmir. Pemerintah India sudah banyak melakukan tindakan untuk mengatasi masalah Etnis Pandit Kashmir, berdasarkan hal tersebut hingga sekarang konflik masih saja terjadi sehingga masalah pengungsi dan imigran Pandit Kashmir masih belum terselesaikan.

Tantangan dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir cukup banyak karena pada daerah ini ada campur tangan dari negara lain. Tantangan lainnya seperti

⁹ "Pakistan arming Kashmir-centric terrorist groups with drones," India Blooms, diakses pada 10 November 2020, diakses pada 20 November, 2022, <https://www.indiablooms.com/news-details/N/66581/pakistan-arming-kashmir-centric-terrorist-groups-with-drones-think-tank>

¹⁰ "As Targeted Killings Spike, Hindus Are Desperate to Flee Kashmir," NYTimes, diakses pada 20 Oktober 2022, <https://www.nytimes.com/2022/06/03/world/asia/india-kashmir-hindu-pandits-attack>

pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan keamanan India serta pemberontak bersenjata. Misalnya, laporan Asia Watch and Physicians for Human Rights menyatakan bahwa dalam satu minggu, 15 kasus pemerkosaan, 44 eksekusi di luar hukum, delapan kasus penyiksaan, dan 20 luka-luka diakibatkan oleh penembakan membabi buta terhadap non-pejuang oleh tentara India dan personel pasukan keamanan,¹¹ pada prinsipnya Militer India seharusnya melindungi Etnis Pandit Kashmir. Adanya terorisme yang menyerang kaum Hindu di lembah Kashmir yang seharusnya sudah terjaga oleh pasukan militer India, membuat Etnis Pandit Kashmir tidak nyaman sehingga ingin keluar dari daerah tersebut.

Pemerintahan Narendra Modi telah berinvestasi dalam memproyeksikan wilayah mayoritas Muslim sebagai bagian India yang stabil dan terintegrasi setelah membubarkan pemerintah terpilih di kawasan itu dengan mencabut status semi-otonom Kashmir pada tahun 2019 untuk membawanya di bawah pemerintahan langsung New Delhi.¹² Sudah banyak upaya yang dilakukan petinggi-petinggi India seperti pada tahun 2019 partai BJP mengadvokasi “kembalinya Pandit Kashmir dengan aman” hal ini dilakukannya dengan menyelesaikan pasal 370 dan 35A.

Perdana Menteri India yaitu Narendra Modi pernah mengklaim bahwa akan ada angin perubahan yang terjadi di Kashmir terutama untuk kaum Pandit Kashmir. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu upaya yang sudah dilakukan Pemerintah India terhadap Kashmir Pandit Kashmir terus berhubungan diplomatis dengan gerakan

¹¹ Saud Sultan , "The obscure Kashmiris in the Kashmir conflict: Analysing the 1990 Kashmiri refugees," *Cogent Arts & Humanities* Vol 9, no. 1 (2022): 4

¹² “As Targeted Killings Spike, Hindus Are Desperate to Flee Kashmir”, NYTimes.

politik nasionalis Hindu, terutama dengan kembalinya BJP berkuasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2014 hingga sekarang.¹³

Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk meneliti situasi Pandit Kashmir karena menyoroti tantangan komunitas minoritas di zona konflik dan peran pemerintah dalam menangani isu tersebut. Masalah hak-hak minoritas adalah masalah yang kompleks dan sensitif di banyak bagian dunia, sehingga upaya Pemerintah India untuk melindungi Pandit Kashmir menunjukkan pentingnya penanganan masalah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Konflik India dan Pakistan sudah berlangsung sejak lama, karena adanya konflik internal dan eksternal di daerah tersebut. Yang paling berdampak pada konflik tersebut adalah minoritas Hindu yaitu Pandit Kashmir, di mana dari tahun ketahun Etnis Pandit Kashmir mengalami penurunan populasi akibat konflik yang tidak berujung ini. India sudah berusaha menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir ini dengan kebijakan *Hindu First*, diketahui juga bahwa Pakistan ingin menjaga konflik di Kashmir ini tetap hidup, hal ini dilakukan agar membuat lemah India agar memenangkan konflik ini, dengan demikian konflik ini harus diselesaikan oleh India karena berhubungan dengan perang kemerdekaan India-Pakistan. Ada tantangan tersendiri bagi India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir, yaitu adanya campur tangan Negara lain, disamping itu terorisme yang menyerang etnis ini yang seharusnya sudah terjaga oleh pasukan militer India, serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan pasukan keamanan

¹³ Haley Duschinski, “‘Survival Is Now Our Politics’: Kashmiri Pandit Community Identity and the Politics of Homeland,” *International journal of Hindu studies* Vol 12, no. 1 (2017):41-64

India. Oleh karena itu, penting dibahas Bagaimana Upaya Pemerintah India dalam menyelesaikan isu Pandit Kashmir.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah *bagaimana upaya Pemerintah India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir?*

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya Pemerintah India dalam melindungi Etnis Pandit Kashmir.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Akademik

Menambah wawasan serta pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai upaya Pemerintah India dalam merespon isu Pandit Kashmir dan bagaimana mereka melindunginya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat Menjadi referensi literasi dalam kajian penstudi HI yang dapat dianalisa dan diteliti lebih lanjut bagi pihak yang berkaitan dalam permasalahan ini.

1.6 Studi Pustaka

Dalam menjawab penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat permasalahan yang diangkat. Adapun beberapa referensi sebagai acuan dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Referensi pertama dalam penelitian ini adalah jurnal yang berjudul *Terrorism and Internal Displacement of Kashmiri Pandits: A Historical Analysis* oleh Malkit Singh.¹⁴ Jurnal ini menjelaskan Etnis Pandit Kashmir bagaimana Pandit Kashmir sebagai pengungsi terbesar di India di bunuh secara brutal dan harta benda dijarah oleh kelompok teroris di Kashmir. Hanya dalam satu tahun atau pada tahun 1990an lebih dari 90% Pandit Kashmir terpaksa melarikan diri dari Kashmir, yang membuat etnis ini berpindah ke tempat pengungsian. Sementara itu, juga jurnal ini menjelaskan apa alasan utama penganiayaan terhadap Pandit Kashmir. Artikel ini berguna bagi penulis untuk meneliti lebih jauh apa kronologi pembantaian terhadap etnis Pandit Kashmir dan bagaimana awal mula etnis ini diberlakukan tidak adil.

Referensi kedua yaitu tulisan Dian Latifiani yang berjudul *Pakistan-India Conflict with Special Reference to Kashmir* yang dimuat dalam *Research Journal of South Asian Studies*, tahun 2015.¹⁵ Pada tulisan ini dijelaskan mengenai bagaimana berbagai segi dari sub-konflik Kashmir, yang telah muncul sebagai salah satu masalah paling berbahaya tidak hanya di Asia Selatan tetapi juga secara global, di mana sangat penting untuk mempelajari konflik secara keseluruhan. Artikel ini melihat bagaimana konflik antarnegara yaitu konflik India dan Pakistan, yang mencakup sub-konflik Kashmir, di mana ini berkaitan dengan penelitian saya yang meneliti bagaimana tindakan India dalam melindungi Etnis Pandit Kashmir yang berada di Kashmir.

¹⁴ Malkit Singh, "Terrorism and Internal Displacement of Kashmiri Pandits: A Historical Analysis," *Himachal Pradesh University Journal* (2020)

¹⁵ Musarat Javed Cheema, "Pakistan-India Conflict with Special Reference to Kashmir," *Journal of South Asian Studies* (2016)

Referensi ketiga yaitu sebuah buku yang berjudul *Internal Displacement and Conflict: The Kashmiri Pandits in Comparative Perspective* yang ditulis oleh Sudha Rajput¹⁶. Buku ini berisi mengenai Fenomena *Internal Displaced Person* atau bisa disebut juga Pengungsi Internal, yaitu kondisi di mana seseorang yang dengan terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya karena kondisi seperti konflik dan bencana alam, fenomena IDP (Internal Displaced Person) tetap kurang dipahami dibandingkan dengan pengungsi karena sifat internal dari krisis, terkait dengan kedaulatan suatu negara, yang memberikan tanggung jawab perawatan kepada aktor nasional sebagai lawan dari badan internasional. Buku ini berkontribusi dalam melihat bagaimana Pandit Kashmir sendiri sebagai pengungsi internal yang dipaksa keluar melalui berbagai kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok yang anti pada minoritas ini, serta bagaimana Pandit Kashmir yang telah lama terpisah dari rumah mereka, dengan peluang yang diragukan untuk kembali untuk mengambil kendali sebanyak mungkin atas hidup mereka.

Referensi keempat adalah *book chapter* yang berjudul *Remembering Home, Imagining the Future Changing Meanings of Home Among Kashmiri Pandits* oleh Ankur Datta.¹⁷ Literatur ini membahas tentang krisis eksistensi yang dihadapi oleh Etnis Pandit Kashmir, di mana untuk mempunyai tempat tinggal saja sulit, serta komunitas minoritas Pandit menderita panas terik di kamp-kamp pengungsian yang jauh dari rumah, hal ini diketahui dari hasil wawancara pengungsi Pandit Kashmir. Pada

¹⁶ Sudha G Rajput, "Internal displacement and conflict: The kashmiri pandits in comparative perspective" *Routledge* (2019)

¹⁷ Ankur Datta, *Remembering Home, Imagining the Future Changing Meanings of Home Among Kashmiri Pandits*. *Routledge*, 2022.

dasarnya book chapter ini juga berisi bagaimana adanya penolakan dan penerimaan pasal 370 di wilayah Jammu yang mayoritas menerima usulan tersebut sedangkan mayoritas masyarakat Kashmir menolak akan pasal tersebut. Serta menjelaskan hubungan Etnis Pandit Kashmir yang dari dulu berbagi sejarah oleh umat Muslim, yang kini renggang dikarenakan konflik dan propanda oleh konflik India-Pakistan. Book chapter ini layak untuk dijadikan referensi bagi penulis karena banyak menjelaskan permasalahan Etnis Pandit Kashmir, dan akan menjadi urgensi kenapa etnis ini harus diselamatkan oleh Pemerintah India. Sementara penelitian yang diteliti oleh penulis berupaya untuk menjelaskan apa saja yang dilakukan India dalam melindungi Etnis Pandit Kashmir.

Referensi kelima berjudul *The Caste of Migrants: Affirmative Action and the Case of Kashmiri Pandits*, yang ditulis Pushpendra Johar.¹⁸ Buku ini menuliskan tentang bagaimana para migran pandit kashmir Pemerintah India memperlakukan para pandit kashmir, bagaimana para Etnis Pandit Kashmir ini berkembang menjadi organisasi-organisasi pemerintah, serta bagaimana para Pandit Kashmir ini berjuang dengan langkah-langkah keadilan sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan kembali hak mereka yang di mana adanya ketimpangan sosial dalam konteks yang sudah tidak setara, karena pada dasarnya Etnis Pandit Kashmir harus beradaptasi dengan memperjuangkan hak mereka lagi dilokasi yang baru. Bagi penulis, buku ini dapat dijadikan sebagai referensi karena memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebagai sumber dalam memahami isu serta melihat

¹⁸ Johar Pushpendra. "The Caste of Migrants: Affirmative Action and the Case of Kashmiri Pandits." *Prabuddha: Journal of Social Equality*, 2018: 45-56.

dampak yang dialami oleh Etnis Pandit Kashmir, serta kebijakan apa yang diterapkan Pemerintah India pada Etnis Pandit Kashmir.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Minority Protection Mechanisms*

Konsep ini menjelaskan tata cara bagaimana melindungi etnis minoritas pada dalam unit, negara bagian, atau wilayah konstituen, ini termasuk memperkuat otonomi untuk kelompok minoritas lokal di dalam unit konstituen atau memperkuat representasi mereka dalam tata kelola unit konstituen, memperkuat otonomi untuk kelompok terlepas dari lokasi mereka dengan memastikan perlindungan hak-hak dasar yang kuat.¹⁹ Menurut Sumit Bisaraya ada beberapa cara untuk melindungi etnis minoritas berikut adalah pembagiannya:

1. *Local Territorial Autonomy*

Strategi untuk melindungi minoritas dalam minoritas di negara federal yaitu dengan memperkuat otonomi teritorial lokal. Ini dapat terwujud dalam berbagai cara:

a. *Empowering Local Government*

Menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah memperkuat pemerintah daerah dengan memberikan bantuan dari pemerintah pusat, sebanding dengan seberapa kuat pemerintah daerah dapat melindungi dan memberdayakan kelompok yang terkonsentrasi secara teritorial dalam sistem federal, hal yang sama juga dapat dilakukan untuk komunitas kecil yang terkonsentrasi secara teritorial. Contohnya

¹⁹ Sumit Bisaraya, "Protecting Ethnic Minorities within Minorities," *International IDEA*, 2020: 1-2.

seperti Ekspansi sektor perusahaan publik dan pembentukan badan-badan fungsional khusus memusatkan peningkatan aktivitas negara di luar rantai pemerintahan.²⁰

United Nations Development Programme (*UNDP*) telah menekankan perlunya pemberdayaan pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dalam laporannya tahun 2007, "Pengembangan Kapasitas untuk Tata Pemerintahan Lokal", UNDP menyatakan bahwa memperkuat pemerintah daerah sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan penyampaian layanan yang efektif.²¹

b. *Special Autonomy Areas*

Daerah Otonomi Khusus mengacu pada daerah atau provinsi dalam suatu negara yang telah diberikan tingkat otonomi yang lebih tinggi dan hak-hak khusus oleh pemerintah pusat. Tujuan dari daerah otonomi khusus adalah untuk memberikan tingkat pemerintahan sendiri yang lebih besar ke daerah-daerah dengan karakteristik budaya, sejarah, dan ekonomi yang berbeda.²²

Memberikan otonomi yang khusus terhadap suatu wilayah di negara federal bahwa alih-alih mendukung pemerintah daerah secara nasional, hanya sejumlah kecil daerah yang signifikan secara historis yang memerlukan lebih banyak otonomi karena demografi etnis mereka yang unik, seperti menjadi rumah bagi minoritas yang

²⁰ de Enterría Martínez-Carande, "Actuación Pública y actuación privada en el Derecho urbanístico," *Revista española de derecho administrativo* (1974): 79-98.

²¹ United Nations Development Programme, *Capacity Development for Local Governance* (New York: United Nations Development Programme, 2023), 10.

²² Syaikh Usman, "Regional autonomy in Indonesia: field experiences and emerging challenges," *The SMERU Research Institute* (2002)

terkonsentrasi secara teritorial di dalam minoritas atau kota besar dengan populasi etnis yang beragam. Pemberian otonomi Khusus bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.²³

Suatu daerah atau wilayah melalui bentuk otonomi tertentu dapat mencegah proses disintegrasi atau pemisahan diri, dan pada saat yang sama melindungi kelompok etnis minoritas dari kehilangan identitasnya. Hal ini terutama relevan dalam situasi di mana ada konflik antara kelompok etnis mayoritas dan minoritas, di mana kelompok minoritas merasa tidak diwakili atau terancam keberadaannya. Dalam situasi seperti itu, memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada wilayah atau daerah yang dihuni oleh kelompok minoritas dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik.²⁴

Dalam konteks ini, otonomi teritorial terbatas dapat menjadi solusi untuk mengatasi ancaman terhadap partisipasi dan representasi minoritas. Namun demikian, pengembangan bentuk otonomi yang tepat harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti karakteristik wilayah yang bersangkutan, aspirasi dan kebutuhan kelompok minoritas, serta keterkaitan wilayah tersebut dengan sistem politik dan kebijakan publik di tingkat nasional.²⁵

²³ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 3.

²⁴ Karen Hébert and Diana Mincyte, "Self-reliance beyond neoliberalism: rethinking autonomy at the edges of empire," *Environment and Planning D: Society and Space* Vol 32, no. 2 (2014): 206-222.

²⁵ Barbora Sanjay, "Autonomous districts and/or ethnic homelands: An ethnographic account of the genesis of political violence in Assam (North-East India) against the normative frame of the Indian constitution," *International Journal on Minority and Group Rights* Vol. 15, No. 2-3, (2008): 313-334.

c. *Union Territories*

India sebagai negara federal memiliki arah tertentu secara hukum diakui sebagai wilayah persatuan, yang merupakan wilayah administratif berbeda yang dikelola semata-mata oleh pemerintah pusat daripada pemerintah negara bagian, wilayah ini berada di bawah kendali presiden.²⁶ Pendukung sistem otonomi semacam itu berpendapat bahwa dalam beberapa kasus, seperti Kashmir, pengaturan semacam itu diperlukan untuk menjaga stabilitas dan mengatasi konflik yang kompleks, mereka diatur oleh administrator atau komisaris utama, hal ini tampaknya bukan unit konstituen nyata dari federasi India.²⁷

d. *Re-territorialization*

Re-teritorialisasi adalah proses yang mencerminkan perjuangan dan negosiasi yang sedang berlangsung atas kekuasaan, identitas, dan representasi dalam masyarakat atau wilayah tertentu. Pentingnya penataan ulang suatu daerah karena kehancuran yang disebabkan oleh pihak luar maupun pihak dalam daerah, di mana komponen-komponen ini kemudian membentuk teritori baru, yang disebut reteritorialisasi.²⁸

2. *Recognition and Representation at State Level*

Sementara otonomi teritorial lokal sebagaimana dijelaskan bahwa mengatur pemerintahan sendiri bagi kelompok minoritas lokal. Pemerintahan bersama di tingkat

²⁶ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 3.

²⁷ Sudhir Kumar, *Political and administrative setup of union territories in India. Mittal Publications*, 1991:1

²⁸ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 3.

negara bagian juga merupakan pertimbangan penting. Gagasan Iris Marion Young tentang “representasi politik sebagai non-dominasi”, yang menekankan pentingnya menciptakan institusi politik yang memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tanpa tunduk pada dominasi atau penindasan.²⁹ Hal ini dibagi dalam beberapa bentuk:

a. *Recognizing a Plural Community through State Constitutions*

Negara federal mengizinkan atau mengamanatkan unit konstituen untuk memiliki konstitusi mereka sendiri. Sebagaimana pada tingkat federal, konstitusi di unit-unit konstituen dapat membuat deklarasi impor simbolis dan legal mengenai komunitas politik yang mereka atur, serta merinci komposisi lembaga perwakilan.³⁰

Pengakuan terhadap masyarakat majemuk melalui konstitusi negara merupakan langkah penting untuk mengakui dan melindungi keberagaman dalam masyarakat. Ini mencerminkan pengakuan bahwa negara-negara memiliki populasi yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda.

b. *Representation in State Political Institutions*

Dengan memiliki representasi kelompok minoritas dalam suatu politik institusi dan Memastikan keterwakilan di institusi negara pusat, jaminan agensi dan perlindungan bagi kelompok minoritas di tingkat nasional adalah strategi yang terkenal dan sering digunakan.³¹

²⁹ Young, Iris Marion, "Self-determination as non-domination: Ideals applied to Palestine/Israel," *Ethnicities* Vol 5, no. 2 (2005): 139-159

³⁰ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 4.

³¹ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 4-5.

3. *Non Territorial Autonomy*

Bentuk-bentuk organisasi kekuasaan teritorial merupakan kategori kedua dan ketiga dari mekanisme institusional untuk perlindungan minoritas dalam minoritas yang dijelaskan di atas.³² Salah satu sarjana terkemuka di bidang ini adalah Will Kymlicka, seorang filsuf politik Kanada yang memperkenalkan konsep otonomi "masyarakat" atau "budaya" pada awal 1990-an. Kymlicka berpendapat bahwa NTA dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi kelompok minoritas sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat yang lebih luas.³³

Pendekatan Non-Territorial Autonomy (NTA) dianggap sebagai suatu metode yang menjanjikan dalam mengatasi berbagai kebutuhan dan keprihatinan kelompok minoritas dalam beragam konteks di seluruh dunia. NTA memiliki kemampuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas dengan memberikan kerangka kerja yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, perhatian diberikan pada hak-hak dan kepentingan kelompok minoritas, termasuk perlindungan identitas budaya, pengakuan politik, serta partisipasi yang adil dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pemberian hak-hak dan keistimewaan tertentu, NTA dapat memfasilitasi integrasi harmonis kelompok minoritas ke dalam masyarakat yang lebih luas, sambil tetap memelihara dan menghormati identitas serta karakteristik khusus mereka.

³² Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 5.

³³ Will Kymlicka, "Nation-building and minority rights: comparing West and East." *Journal of ethnic and Migration Studies* Vol 26, no. 2 (2000): 183-212.

4. *Religious Law and Official Language*

Konsep hukum agama dan bahasa resmi memiliki implikasi penting bagi kelompok minoritas dalam masyarakat. Kelompok minoritas mungkin memiliki identitas linguistik dan budaya yang berbeda, dan pengalaman serta perspektif mereka mungkin berbeda dari mayoritas. Oleh karena itu, isu-isu yang berkaitan dengan hukum agama dan bahasa resmi menjadi semakin penting jika dilihat dari kaca mata hak-hak minoritas.³⁴

Hak untuk mempraktikkan agamanya sendiri dan bahasa resmi adalah dua contoh ekspresi budaya yang harus didiskusikan secara singkat dalam konteks minoritas di dalam minoritas. Di beberapa negara, undang-undang yang berkaitan dengan agama dapat diterapkan pada individu di mana pun mereka berada, selain perlindungan hak-hak dasar yang ditemukan dalam konstitusi federal dan negara bagian.³⁵

Konsep *Mechanism Minority Protection* digunakan untuk menjelaskan bagaimana melindungi minoritas di suatu kawasan konflik dan memastikan bahwa kelompok minoritas dapat berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan menikmati kesempatan dan perlindungan yang setara. Oleh karena itu akan digunakan beberapa indikator yang cocok untuk meneliti isu ini. Untuk itu, konsep ini akan peneliti gunakan

³⁴ Office of the High Commissioner for Human Rights, *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation* (New York: Office of the High Commissioner for Human Rights, 2010), 2.

³⁵ Sumit Bisaraya, *Protecting Ethnic Minorities within Minorities*, 7.

untuk membantu menjawab bagaimana upaya India dalam melindungi Etnis Pandit Kashmir.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penyajian data dalam bentuk penulisan ilmiah dan penjelasan tentang fakta-fakta nyata yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini mencakup analisis deskriptif yang didukung oleh data yang akan Peneliti sajikan karena mengkaji fenomena politik Pemerintahan India. Landasan teori yang digunakan akan sangat berpengaruh baik terhadap metodologi penelitian maupun gambaran umum yang dapat ditarik, sehingga keduanya harus saling berhubungan.

1.8.2 Batasan Masalah

Adapun tujuan dari pemberian batasan masalah adalah untuk membantu mengarahkan penelitian agar lebih spesifik dan jelas sehingga dapat difokuskan kepada pokok permasalahan. Pada penelitian ini akan dijabarkan mengenai upaya Pemerintah India dalam melindungi Etnis Pandit Kashmir. Peneliti akan bergerak pada kurun waktu 2019 hingga 2023. Tahun 2019 merupakan tahun awal pencabutan pasal 370 yang menghilangkan hak khusus otonomi kashmir, awal mula banyak terjadi kasus yang meneror nyawa Etnis Pandit Kashmir dan India memulai untuk melindungi Etnis Pandit Kashmir. Pemilihan tahun 2023 menjadi batas penelitian penulis karena masa studi peneliti.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Berdasarkan definisi, unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis, maka dari itu unit analisis pada penelitian ini adalah menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir. Kemudian yang menjadi unit eksplanasi pada penelitian adalah upaya Pemerintah India. Serta tingkat analisisnya adalah negara

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, khususnya proses pengumpulan data tertulis dari buku, jurnal online, situs resmi, arsip pemerintahan, dokumen-dokumen resmi negara, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Peneliti akan menganalisis data dari berbagai sumber tersebut dan memberikan penjelasan yang lebih detail. Di mana data akan dikumpulkan dan digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian. Kemudian, informasi akan dikumpulkan dari sumber data tersebut dan digunakan sebagai sumber referensi saat melakukan penelitian. Setelah memproses data, sejumlah solusi untuk masalah ini dihasilkan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahapan dalam melakukan teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahap, sebagai berikut: Tahap pertama yaitu pengelompokan data, peneliti mengelompokkan data-data yang sudah ditemukan dan membaginya dalam beberapa kategori yang sesuai alur penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data. Pada tahap ini, peneliti akan lebih memahami masalah yang diteliti, Peneliti memilah data yang tidak sepenuhnya relevan dengan penelitian yang akan

diteliti. Data seleksi kemudian menjadi dasar untuk analisis penelitian ini. Setiap potongan informasi dengan cepat disaring untuk menentukan apakah informasi akan berkontribusi pada pertanyaan penelitian atau tidak. Tahap ketiga yaitu Penyajian Data. Agar konsep yang dipilih yaitu mekanisme proteksi minoritas lebih mudah dipahami, data dikaitkan dengan kerangka konseptual, kemudian konsep tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi. Menemukan pola yang dapat digunakan untuk membuat inferensi merupakan tujuan dari penyajian data. Terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Proses analisis data berakhir pada tahap ini, data dikumpulkan, dimasukkan, dan ditarik kesimpulan. Setelah itu, informasi tersebut yang akan mendukung penulisan dan membantu menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini akan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, penjabaran kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, batasan masalah, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Dinamika Konflik Etnis Pandit Kashmir

Bagian ini akan membahas bagaimana kondisi minoritas Pandit Kashmir dari konflik yang terjadi.

Bab III Kepentingan dan Tantangan India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang apa saja kepentingan India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir, dan tantangan yang dilalui oleh Pemerintah India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir ini.

Bab IV Upaya Pemerintah India dalam Menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir

Bab ini akan menjawab pertanyaan penelitian dengan pengaplikasian kerangka konseptual dilihat melalui upaya Pemerintah India dalam menyelamatkan Etnis Pandit Kashmir.

Bab V Penutup

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari penelitian.

